PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya bidang garapan baru Panitia Khusus untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon akan dilakukan Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus.

b. Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus sebagaimana huruf a, dipandang perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

c. bahwa Perubahan Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANSUS I

A. **SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. MAHMUDI, SPdI	KETUA
2. AAN SETYAWAN, S.Si	WAKIL KETUA
3. DIAH IRWANY INDRIYANI, S.PdI	SEKRETARIS
4. R. HASAN BASORI, SE.MSi	ANGGOTA
5. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
6. YOGA SETIAWAN, SE	ANGGOTA
7. SISKA KARINA, SH. MH	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. HJ. NANA KENCANAWATI, SPd	ANGGOTA
10. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
11. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
12. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
13. NURHOLIS, SPdI	ANGGOTA
14. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA
15. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. ANTON MAULANA, ST. MM	KETUA
2. ABDUL ROHMAN	WAKIL KETUA
3. PANDI, SE	SEKRETARIS
4. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.PdI	ANGGOTA

5. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
6. Hj. ERYATI	ANGGOTA
7. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
8. SURYANTI	ANGGOTA
9. H. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
10. TARSENI	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Dr. Hj. HANIFAH, MA	KETUA
2. TITI SUMANTI	WAKIL KETUA
3. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	SEKRETARIS
4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA
5. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
6. SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
7. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
8. ROSIHAN RUSMANA	ANGGOTA
9. SOFWAN ,ST	ANGGOTA
10. MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
11. HERIYANTO, ST	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MAHMUD JAWA, SH	KETUA
2. H. KHANAFI,SH. MH	WAKIL KETUA
3. MAD SALEH	SEKRETARIS
4. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF, B.Comm. MPA	ANGGOTA

5. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
8. H. MUNAWIR, SH	ANGGOTA
9. H. HERMANTO, SH	ANGGOTA
10. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, M.PdI	ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

a. Bidang Garapan Pansus I :
   - Rancangan Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
   - Rancangan Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Bidang Garapan Pansus II :
   - Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
   - Rancangan Perda tentang Pokok – Pokok Keuangan Daerah.

c. Bidang Garapan Pansus III :
   - Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sampah.
   - Rancangan Perda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

d. Bidang Garapan Pansus IV :
   - Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2021 – 2036.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 16 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.